

## ABSTRAK

Perkotaan Cepu ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dalam hierarki perkotaan nasional, namun secara administratif hanya berstatus kecamatan di bawah Kabupaten Blora tanpa otonomi perencanaan yang sepadan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana pusat pertumbuhan yang tidak memiliki kapasitas kelembagaan memadai tetap mampu menjalankan fungsinya secara efektif. Penelitian ini bertujuan menganalisis sejauh mana Perkotaan Cepu telah menjalankan fungsinya sebagai pusat pertumbuhan di wilayah lintas Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, sekaligus mengkaji kapasitas kelembagaan yang mendukung atau membatasi efektivitas tersebut, serta merumuskan implikasi kebijakan bagi pengembangan Kawasan Cepu Raya. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif berbasis analisis spasial GIS yang terintegrasi secara multistap, mencakup enam analisis berurutan, yaitu analisis wilayah pengaruh, analisis struktur perkotaan, analisis struktur perekonomian, analisis peran perkotaan, analisis keterkaitan pusat dengan sub-pusat, dan analisis kapasitas kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wilayah pengaruh fungsional Perkotaan Cepu mencakup 21 kecamatan dari tiga kabupaten di dua provinsi. Seluruh kecamatan Kabupaten Ngawi berada di luar batas pengaruh, sehingga mempertanyakan relevansi empiris pemasukan Ngawi dalam rencana Kawasan Cepu Raya. Cepu menempati Orde I dalam hierarki perkotaan dengan skor sentralitas 4,26 kali lipat terhadap sub-pusat primer terdekat. Berdasarkan matriks peran perkotaan, Cepu berada di Kuadran I sebagai *Motor Growth Pole* dengan kesesuaian status PKW terpenuhi, meskipun distribusi manfaat pertumbuhan menunjukkan ketimpangan sedang (Indeks Williamson = 0,4188). Tiga dari enam sub-pusat memiliki tipologi *Inclusive Spread Linkage*, sementara tiga lainnya menunjukkan *Constrained Linkage* akibat hambatan konektivitas dan tekanan kompetitif dari perkotaan tetangga. Kapasitas kelembagaan dinilai tidak memadai secara otonomi daerah, namun kehadiran kelembagaan vertikal pusat yang multisektoral menghasilkan efektivitas fungsional pada level sedang, sehingga kondisi akhir Perkotaan Cepu ditetapkan sebagai Efektif Parsial (Kondisi B). Penelitian ini merekomendasikan pembentukan kelembagaan koordinasi lintas provinsi yang bersifat formal, penguatan konektivitas di koridor sub-pusat *Constrained Linkage*, serta penetapan batas fungsional Kawasan Cepu Raya berdasarkan bukti spasial yang terukur.

**Kata kunci:** pusat pertumbuhan, Perkotaan Cepu, wilayah pengaruh, kapasitas kelembagaan, analisis spasial